

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resistensi Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia melalui pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA), dengan menggunakan dua teori utama, yaitu teori modernisasi dan teori ketergantungan. Dalam konteks ini, kebijakan Indonesia untuk melarang ekspor nikel berusaha meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dalam negeri, yang sejalan dengan prinsip-prinsip modernisasi. Di sisi lain, resistensi Uni Eropa terhadap kebijakan tersebut mencerminkan ketegangan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal kontrol terhadap sumber daya alam dan struktur pasar global yang ada.

Dalam pandangan Van Dijk mengenai *Critical Discourse Analysis*. Ada tiga bagian penting dalam CDA yaitu, Teks, Kognisi Sosial, dan Konteks Sosial. Dari ketiga bagian tersebut merupakan kesatuan analisis yang saling memiliki kaitan. Dalam analisis wacana ini peneliti melakukan analisa terhadap teks tentang wacana apa yang dikembangkan Uni Eropa atas resistensinya terhadap kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia.

A. Dalam analisis wacana Van Dijk membagi teks menjadi tiga struktur yaitu struktur makro, superstruktur, dan mikro.

1. Struktur Makro dalam analisis wacana Van Dijk berfokus pada tema utama atau inti dari wacana yang menjadi landasan pembahasan. Dalam konteks resistensi Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia

mencakup dinamika perdagangan, kebijakan hilirisasi, dan konflik kepentingan antara Indonesia dan Uni Eropa

2. Superstruktur dalam analisis wacana Van Dijk berfokus bagaimana cara wacana disusun dan elemen-elemen tertentu terhubung satu sama lain, dalam analisis wacana resistensi Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dibagi menjadi tiga skemantik, yang *pertama* pelarangan ekspor nikel Indonesia, yang *kedua* adalah gugatan Uni Eropa, yang *ketiga* adalah respon Indonesia.
3. Struktur mikro dalam model analisis wacana Van Dijk merujuk pada elemen-elemen kecil atau bagian terperinci dalam teks wacana yang saling terkait. Dalam analisis wacana kritis ini dibagi menjadi latar, detil, dan analisis ideologi

B. Kognisi Sosial

Kognisi sosial mencerminkan pola pikir, ideologi, dan perspektif yang mendasari tindakan atau sikap dalam sebuah wacana. kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia dipersepsikan Uni Eropa sebagai ancaman strategis terhadap kepentingan mereka, terutama sektor manufaktur dan teknologi. Uni Eropa sangat bergantung pada pasokan bahan mentah seperti nikel untuk industri baja, baterai kendaraan listrik, dan teknologi energi hijau. Dengan kebijakan ini Indonesia memaksa Uni Eropa untuk membeli produk hilir seperti feronikel. Hal ini meningkatkan biaya produksi amerika dan mengurangi daya saing mereka di pasar global. Kebijakan ini menajdi tantangan terhadap aturan perdagangan bebas yang selama ini menjadi landasan sistem ekonomi global.

C. Konteks Sosial

Dalam analisis wacana model Van Dijk, konteks sosial merujuk pada lingkungan sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi dan membentuk wacana tertentu. Dalam penelitian ini konteks Uni Eropa atas resistensi terhadap Uni Eropa ada lima yaitu: pentingnya nikel sebagai komoditas global, konteks kebijakan dan regulasi perdagangan internasional, konteks geopolitik, dan konteks domestik Uni Eropa. inilah konteks mengapa Uni Eropa melakukan resistensi terhadap kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia.

Indonesia memiliki sistem ekonomi yang berbeda dengan ekonomi kapitalis dan sosialis, Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Dalam sistem ekonomi pancasila nikel sebagai sumber daya strategis harus dikelola secara berkeadilan, berkelanjutan, dan untuk kesejahteraan rakyat. Hilirisasi nikel adalah langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi ketergantungan pada ekspor mentah, dan menciptakan ekonomi nasional yang kuat, berdaya saing, dan berdasarkan nilai-nilai pancasila. Kegiatan ekonomi yang berorientasi pada ekspor mentah menguntungkan negara maju, dalam konteks resistensi Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia, Uni Eropa merasa dirugikan karena kehilangan akses terhadap bijih nikel mentah Indonesia.

Penolakan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia membuka peluang bagi Tiongkok dalam menguasai nikel Indonesia. Hal ini disebabkan Uni Eropa yang merupakan konsumen nikel Indonesia terbesar kedua, tidak berinvestasi di Indonesia untuk membangun fasilitas smelter di Indonesia. Hal ini mengakibatkan dominanya investasi China di Indonesia. Hal ini menyebabkan

Indonesia semakin bergantung pada investasi dan teknologi China, China memperkuat kendalinya atas rantai pasok nikel global, Indonesia kehilangan posisi tawar, hal ini disebabkan oleh dominasi China pada investasi nikel di Indonesia.

Saran

Dalam sistem pembagian kerja dunia. Perlu adanya keadilan utara dan selatan. Karena itu penting adanya dialog antara utara dan selatan. Sistem pasar bebas dan globalisasi harus menciptakan neraca perdagangan yang adil. Sehingga manfaat dari hubungan negara dalam pergaulan internasional menjadi tidak timpang. Negara maju semakin kaya sedangkan negara pinggiran tetap dalam ketertinggalan dan kemunduran. Oleh karena itu penting adanya dialog selatan dan utara.

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam salah satunya adalah nikel. Negara dunia ketiga seringkali harus mengikuti aturan dari negara dunia pertama. Aturan yang ada terkesan pro terhadap kepentingan negara maju. Oleh karena itu perlu bagi negara dunia ketiga mempunyai keleluasan dalam kebijakan makro ekonominya, termasuk dalam hilirisasi nikel.

Hilirisasi nikel harus dijalankan berdasarkan cita-cita bangsa. Bukan sekedar populisme belaka. Apalagi mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal faktanya elit lah yang paling diuntungkan. Dalam pengelolaan sumber daya alam, harus dilakukan secara bertanggungjawab, dan berwawasan lingkungan. Apalagi pengelolaan sumber daya alam model kapitalisme yang hanya mementingkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang kecil, dampak lingkungan adalah hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya alam.